

FUNGSI DAN PERAN KEPALA KAMPUNG DALAM MENJALANKAN TUGAS DI KAMPUNG LINGGANG MAPAN KECAMATAN LINGGANG BIGUNG KABUPATEN KUTAI BARAT

Berta Haryanti¹

Abstrak

Berta Haryanti, 1102015222, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Program studi Ilmu Administrasi Negara, yang mengangkat judul Skripsi Fungsi dan Peran Kepala Kampung dalam Menjalankan Tugas di Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, di bawah bimbingan Bapak Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si Pembimbing I, dan Ibu Hj. Hariati S.Sos., M.Si sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi dan Peran Kepala Kampung dalam menjalankan Tugas di Kampung Linggang Mapan, Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan atau menjabarkan objek yang di teliti berdasarkan fakta di lapangan. Dengan menggunakan informan sebagai sumber data, data-data yang di sajikan menggunakan data primer dan sekunder melalui wawancara, dokumen dari Kantor Kepala Kampung Linggang Mapan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Fungsi dan Peran Kepala Kampung dalam Menjalankan Tugas, di Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat sudah berjalan dengan baik. Sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, meskipun belum sepenuhnya maksimal, masih banyak kendala-kendala dalam menjalankan tugas serta tanggungjawab yang di jalankan.

Kata Kunci : Fungsi dan Peran Kepala Kampung Dalam Menjalankan Tugas

PENDAHULUAN

Salah satu wujud dari penerapan demokrasi di Indonesia saat ini adalah pemberian hak sekaligus wewenang otonomi dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang di maksudkan agar daerah-daerah yang secara geografis jauh dari Pemerintah pusat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara cepat dan merata, dalam hal mencapai tujuan. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonom luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah di harapkan mampu

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : berthaharyanti@gmail.com

meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan roda Pemerintahan. Peran seorang pemimpin sangat penting dalam mengayomi kinerja Pemerintahan yang dijalkannya. Terlebih di tengah pelaksanaan Otonomi Daerah sekarang ini, maka hal yang paling menentukan adalah sikap profesionalitas dari Aparatur Pemerintahan, khususnya pejabat yang memimpin lembaga-lembaga Pemerintah Daerah sebagai unsur pelaksana, aparatur Pemerintah Daerah menduduki posisi vital dalam keseluruhan proses penyelenggaraan. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila di katakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat tergantung kepada kemampuan aparaturnya”. Tanggung jawab aparat Pemerintahan Daerah, sangat di tuntutan untuk memimpin dan mengayomi bawahan serta masyarakatnya. Dalam hal ini dapat di artikan sebagai perilaku dan sikap, di mana seorang memotivasi orang lain agar mau bekerja keras mencapai tujuan tertentu. Jadi secara sederhana dapat di katakan bahwa, kepemimpinan merupakan kemampuan yang di miliki seseorang pergunakan orang lain agar mau bekerja mencapai tujuan dan sasaran.

Begitu pula dengan tingkat organisasi Pemerintahan terkecil di dalam wilayah Negara Indonesia, yakni Pemerintahan Kampung sebagai salah satu perangkat Pemerintahan Daerah yang memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas. Di dalam peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang kepala kampung, pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa, “Kepala Kampung merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di wilayah kecamatan”.

Kampung dipimpin oleh seorang kepala kampung yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan dalam arti pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang di limpahkan kepada Kepala Kampung, urusan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum seperti jalan, jembatan, irigasi, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Kampung dan urusan kemasyarakatan berarti pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Kampung. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2006 tentang perangkat Kampung dalam menjalankan tugas menjelaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Barat, perlu dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk Pemerintah Kampung atas dasar peran serta masyarakat dengan memadukan nilai-nilai teradisional dan prinsip-prinsip organisasi modern. Kepala kampung adalah pemimpin kampung yang berwenang dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga kampung secara otonom. Pasal 2 ayat, 1, sedangkan kepala kampung adalah Pemerintah Kampung merupakan satu kesatuan sistem pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pasal 2, ayat (2)) yang terdiri dari komponen-komponen: badan

permusyawaratan kampung sebagai badan yang menjalankan fungsi legislasi dan kontrol dalam lingkup wilayah kampung, pemerintah kampung sebagai badan yang menjalankan fungsi eksekutif dalam lingkup wilayah kampung.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fungsi dan Peran Kepala Kampung dalam menjalankan Tugas Di Kampung Linggang Mapan?
2. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung Fungsi dan Peran Kepala Kampung dalam menjalankan Tugas Di Kampung Linggang Mapan?

Tujuan Penelitian

1. Bagaimana Fungsi dan Peran Kepala Kampung dalam menjalankan Tugas Di Kampung Linggang Mapan?
2. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung Fungsi dan Peran Kepala Kampung dalam menjalankan Tugas Di Kampung Linggang Mapan?

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi Pemerintah Daerah yang memerlukan informasi tentang bagaimana Fungsi dan Peran Kepala Kampung dalam menjalankan Tugas di Kampung Linggang Mapan, Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Mahasiswa
Mengembangkan dan menerapkan ilmu atau teori yang didapat dari bangku kuliah;
Meningkatkan dan menambah wawasan bagi penulis dalam bidang yang ditekuni;
 - c. Masyarakat
Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Fungsi dan Peran Kepala Kampung dalam menjalankan Tugas. Sehingga dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kampung untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di kampung.

KERANGKA DASAR TEORI

Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan salah satu fenomena yang paling mudah di observasi, tetapi menjadi salah satu hal yang paling sulit untuk dipahami. (Richard L. Daft,1999). Mendefinisikan kepemimpinan merupakan suatu masalah yang kompleks, dan sulit karna sifat dasar kepemimpinan itu sendiri memang sangakt kompleks. Akan tetapi, perkembangan ilmu saat ini telah membawa banyak kemajuan sehingga pemahaman tentang kepemimpinan menjadi lebih sistematis dan objektif.

Rost.,dalam Safaria 2004 memberikan definisi kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi diantara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya.

Kepala Kampung

Kepala kampung dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, bertanggung

jawab secara langsung kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Dengan demikian kinerja Pemerintah Kecamatan, juga sangat tergantung seberapa besar kepemimpinan Kepala Kampung di wilayah kerjanya, dalam perencanaan pembangunan di Kampungnya, secara umum, Kepala Kampung memiliki beberapa fungsi utama, yakni sebagai berikut, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2006 tentang perangkat kampung, pasal 6 ayat 1 mengatakan petinggi/kepala kampung sebagaimana di maksud pada pasal 5 huruf a merupakan alat pemerintah, mempunyai tugas :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kampung;
- b. Pembinaan kehidupan masyarakat kampung;
- c. Pengembangan kehidupan perekonomian masyarakat kampung;
- d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung;
- e. Pendamaian perselisihan warga masyarakat di kampung;
- f. Perwakilan kampung di dalam dan di luar pengadilan, serta penunjukan kuasa hukum;
- g. Penyusunan Rancangan peraturan kampung bersama BPK;

Hak Kepala Kampung

1. Mengajukan pencalonan perangkat kampung kepada pejabat yang berwenang.
2. Mewakili kampungnya didalam dan diluar pengadilan.
3. Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili kampungnya.
4. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung.
5. Mewakili kampungnya dalam rangka kerjasama.

Wewenang Kepala Kampung

1. Menyelenggarakan rapat Lembaga Musyawarah kampung.
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong-royong masyarakat.
4. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat.
5. Menetapkan keputusan Kepala Kampung sebagai pelaksana
Dari keputusan kampung.

Fungsi Kepala Kampung

Berbicara mengenai fungsi kepala kampung dalam melaksanakan tugasnya adalah mengelola pemerintahan kampung yang erat kaitannya dengan pembangunan, yaitu baik pembangunan fisik maupun non fisik dengan tugas yang dipercayakan itu, kepala kampung tentunya dibantu oleh perangkat kampung dalam mencapai tujuan yang di harapkan menurut A.W. Widjaja (1996:22) mengucapakan fungsi-fungsi kepala kampung sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan dalam rumah tangga sendiri,
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat,
3. Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya,
4. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah daerah di atasnya yang berhubungan dengan Fungsi dan peran kepala kampung.

Peran Kepala Kampung

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tugas dan kewajiban Kepala kampung, kepala kampung mempunyai peran sebagai berikut :

- a. Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Pembinaan masyarakat kampung;
- c. Mengajukan rancangan peraturan kampung;
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif;
- f. Membina kehidupan masyarakat kampung;
- g. Menetapkan peraturan kampung bersama BPK.

Pengertian Peran

Menurut Narkowo dan Suryanto, (2004:138-139) menyebutkan bahwa peran (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Artinya peran merupakan suatu akibat yang ditimbulkan ketika seseorang tersebut menduduki sebuah kedudukan dalam masyarakat. Menurut Suhardono, (1994:3) bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi suatu jabatan. Menurut Adam (2000:935), peran adalah perilaku yang diharapkan dalam kerangka posisi sosial tertentu.

Definisi Konsepsional

Berkenaan dengan penelitian ini, penulis mendefinisikan Konsepsional mengenai Fungsi dan Peran Kepala Kampung dalam Menjalankan Tugas di Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat yaitu mempunyai tugas dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintah Kampung, membina kehidupan masyarakat Kampung, Pemberdayaan masyarakat, dan memberikan pelayanan, serta menjalin hubungan kerja dengan mitra Pemerintah Kampung, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, Membina dan mengayomi masyarakat kampung.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2002:115), Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini di karenakan secara prinsip tujuan dari metode ini adalah untuk mendeskripsikan secara rill mengenai suatu situasi tertentu atau keterkaitan hubungan antara berbagai fenomena secara faktual dan teratur.

Fokus Penelitian

1. Fungsi dan Peran Kepala Kampung dalam menjalankan Tugas
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di kampung;
 - b. Pembinaan kehidupan masyarakat kampung;
 - c. Pengembangan kehidupan perekonomian masyarakat Kampung.

2. Faktor penghambat dan Faktor pendukung Fungsi dan Peran Kepala Kampung dalam menjalankan Tugas?

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Kepala Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. Penulis memilih lokasi penelitian di daerah tersebut sesuai dengan judul skripsi, yaitu “Fungsi dan peran Kepala Kampung dalam menjalankan Tugas”.

Sumber Data

1. Data Primer yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari informan. Informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Desa Mendik Karya. Sedangkan informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kepala Dusun, Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Mendik Karya.
2. Data Sekunder yaitu data diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain dokumen dan buku-buku ilmiah.

Teknik Pengumpulan Data

1. Library Research yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi. Buku yang dijadikan pedoman pada penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan peran pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pembangunan desa.
2. *Field Work Research* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif dari Miles, Huberman dan Jhony Saldana (2014;133) mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga komponen yaitu :

1. Kondensasi Data (*Data Conndensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Kondensasi data yang dipersiapkan dapat ditemukan pada kerangka konseptual, pada kasus-kasus, pada pertanyaan penelitian, dan pada pendekatan pengumpulan data yang dipilih.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Alur penting kedua dari aktivitas analisis adalah penyajian data. Secara umum, penyajian adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Pola frekuensi yang paling sering untuk data kualitatif di masa lalu telah memperluas teks. Dengan menggunakan teks yang luas menjadikan peneliti kemungkinan menemukan kemudahan untuk melompat menuju ketergesaan, parsialitas, dan tidak menemukan kesimpulan.

3. Penganbilan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menginterpretasikan hal-hal apa yang tidak berpola, penjelasan-penjelasan, alur kausal, dan proposisi. Kesimpulan akhir tidak akan datang hingga pengumpulan data berakhir, tergantung pada ukuran catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencaharian yang digunakan, daya tarik peneliti, dan batas-batas lain yang dapat ditemukan. Verifikasi dapat menjadi penentu sebagaimana lintasan kedua dari pikiran melalui tulisan, dengan rincian pendek dari catatan-catatan lapangan atau tidak dicari dan digabungkan dengan argumentasi pendek dan rewiu dari kolega untuk membangun “*consensus intersubjektif*” atau dengan hasil baik untuk menampilkan bentuk lain dari penemuan dalam data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Kampung

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Kampung. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kampung, Kepala Kampung dalam melaksanakan tugasnya adalah mengelola pemerintahan kampung yang erat kaitannya dengan pembangunan, yaitu baik pembangunan fisik maupun non fisik dengan tugas yang dipercayakan itu, kepala kampung tentunya dibantu oleh perangkat kampung dalam mencapai tujuan yang di harapkan. A.W. Widjaja (1996:22) mengucapkan fungsi-fungsi kepala kampung sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan dalam rumah tangganya sendiri,
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat,
- c. Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya,
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pemerintah daerah di atasnya yang berhubungan dengan fungsi dan peran kepala kampung.

Pembinaan Kehidupan Masyarakat Kampung

Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Kampung yang memiliki tanggungjawab dalam menjalankan urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang perangkat Kampung dalam menjalankan Tugas. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis mengenai Pembinaan Kehidupan Masyarakat Kampung sudah dilaksanakan, meskipun belum sepenuhnya maksimal di jalankan. Dan masih perlu perbaikan-perbaikan dalam Pembinaan Kehidupan Masyarakat Kampung.

Pengembangan Kehidupan Perekonomian Masyarakat Kampung

Kepala Kampung menjadi penting perannya karna dialah yang bertugas untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pembangunan di kampung. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh

penulis dapat dikatakan bahwa Pengembangan Kehidupan Perekonomian Masyarakat Kampung sudah di jalankan, tetapi belum sepenuhnya maksimal dalam pengembangan perekonomian khususnya di bidang pertanian. Masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan di bidang pertanian.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Fungsi dan Peran Kepala Kampung dalam Menjalankan Tugas

Faktor Penghambat

1. Kurangnya fasilitas yang diberikan sehingga pelaksanaan dan fungsi serta peran kepala kampung belum sepenuhnya maksimal.
2. Minimnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintahan kampung, sehingga menjadi hambatan dalam pembangunan. Khususnya yang ada di kampung linggah mapan.
3. Kuarangnya musyawarah kampung/rapat-rapat kampung, sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan serta keputusan-keputusan yang ada di kampung.
4. Kurangnya penguasaan komputer di kalangan staf kantor kepala kampung, sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas yang di jalankan, khususnya bagian surat-menyurat.

Faktor Pendukung

Fungsi dan Peran Kepala kampung dalam menjalankan tugas, didukung penuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan wilayah kecamatan. Selain itu juga fungsi dan peran Kepala Kampung di dukung oleh masyarakat Kampung dalam menjalankan tugasnya. Serta didukung dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai untuk memudahkan urusan, serta tugas-tugas yang ada di kantor Kepala Kampung dan adanya bantuan dana dari Pemerintah Daerah per tahunnya, untuk mengurus urusan Pemerintahan di Kampung, baik fasilitas-fasilitas di kantor maupun untuk pembangunan serta pembinaan masyarakat yang ada di kampung.

Pemerintahan Kampung juga berinteraksi dengan organisasinya yaitu Pemerintahan Kampung tersebut terlaksana dengan baik sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat kampung. Kepala Kampung adalah bagian dari Pemerintahan Kampung dan memegang tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan Pemerintah Kampung.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kepala kampung dalam menjalankan Fungsi dan Perannya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kampung sudah di laksanakan, walaupun masih belum sepenuhnya maksimal. Masih terdapat kendala-kendala dalam Penyelenggaraan Pemerintah, dan Kemasyarakatan di Kampung. Masih kurangnya musyawarah atau rapat-rapat Kampung.
2. Fungsi dan Peran Kepala Kampung dalam Pembinaan Kehidupan Masyarakat Kampung sudah dilaksanakan, tetapi masih kurangnya peran RT dalam

Pembinaan Kehidupan masyarakat Kampung. Sehingga pembinaan masyarakat masih sangat kurang dan belum sepenuhnya optimal di jalankan.

3. Fungsi dan Peran Kepala Kampung dalam Pengembangan Kehidupan Perekonomian Masyarakat Kampung, sudah di jalankan tetapi belum sepenuhnya maksimal, di karenakan masih kurangnya penyuluhan dan pengembangan di bidang pertanian.
4. Faktor Penghambat
Kurangnya fasilitas yang diberikan sehingga pelaksanaan dan fungsi serta peran Kepala Kampung belum sepenuhnya maksimal. Minimnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintahan Kampung, sehingga menjadi hambatan dalam pembangunan, dan kurangnya musyawarah kampung/rapat-rapat kampung, sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan serta keputusan-keputusan yang ada di kampung. serta Peran RT belum sepenuhnya di maksimalkan, dalam urusan masyarakat kampung.
5. Faktor Pendukung
Fungsi dan Peran Kepala kampung dalam menjalankan tugas, didukung penuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan wilayah kecamatan. Selain itu juga fungsi dan peran Kepala Kampung di dukung oleh masyarakat Kampung dalam menjalankan tugasnya. Serta didukung dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai untuk memudahkan urusan, serta tugas-tugas yang ada di kantor Kepala Kampung dan adanya bantuan dana dari Pemerintah Daerah per tahunnya, untuk mengurus urusan Pemerintahan di Kampung, baik fasilitas-fasilitas di kantor maupun untuk pembangunan serta pembinaan masyarakat yang ada di kampung.

Saran

1. Kepala Kampung perlu meningkatkan lagi musyawarah atau rapat-rapat Kampung. Sehingga Fungsi dan Peran Kepala Kampung dapat berjalan dengan optimal. Dan Peran RT dapat ditingkatkan lagi agar, pelaksanaan atau program kerjanya dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan.
2. Kepala Kampung harus bisa membina Kehidupan Masyarakat Kampung dengan baik agar Pembinaan dapat berjalan dengan optimal, harus adanya kerjasama antara ketua RT dan kepengurusan Kampung.
3. Meningkatkan lagi penyuluhan pertanian khususnya untuk warga Kampung, dalam mengembangkan lahan pertaniannya.
4. Mengusulkan sarana-sarana untuk pengembangan dan pembangunan di Kampung untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Perlu ditingkatkan lagi dalam menumbuhkan kembangkan semangat jiwa gotong royong masyarakat kampung,
6. Perlu adanya kerja sama antara Kepala Kampung dengan stafnya, agar tugas dan tanggung jawab dapat berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Arikunto, 2005. Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta.
- Drs. Josef Riwu Kho, MPA 2002. Cetakan keenam Prosepk Otonomi Daerah di Negara. Republik Indonesia. PT. Rajagrafindo Prsada.
- Dwiyanto, 2006:50-51 Teori Administrasi Publik. Alfabeta, Bandung.
- Harbani Pasolong, 2013. Cetakan kelima Teori Administrasi Publik. Alfabeta, Bandung
- Henry Pratt Fairchild 1960 Definisi Kepemimpinan. Cetakan ke-2 2010. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- James A. Lee dalam bukunya Management Theories and Prescriptions. PT. RAJAGRAFINDO PERSADA
- Kartono 2011. Cetakan ke-18 Pemimpin Dan Kepemimpinan. PT. Rajagrafindo Prsada.
- Kartini Kartono 2005:51 Definisi Kepemimpinan. 2010 Cetakan ke-2 Penerbit Alfabeta. Cv.
- Miles, Malthew. B dan A. Michael Huberman 1992, Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Narkowo dan Suryanto 2004:138:139 Pengantar Sosiologi Penerbit. Afabeta. Bandung.
- Rost 1993. Kepemimpinan. Cetakan pertama. Yogyakarta Penerbit Graha Ilmu 2004.
- Stoner 1996:161.110 Definisi Kepemimpinan. Penerbit. Alfabeta. Cv
- Sugiyono 2010. Cetakan ke-10 Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D ALFABETA. Cv.

Dokumen-Dokumen :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah No 37 Tahun 2005 Tentang Kepala Kampung.
- Peraturan Daerah No 24 Tahun 2006 Tentang Perangkat Kampung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa.